

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjatuhkan Pidana*, Depok: Raih Asa Sukses, hal. 35.
- Andrisman, Tri, 2009, *Asas-asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, hal. 8.
- Annisa, Yulia Dwi, 2016, “Perkembangan Penggunaan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Dewasa Ini”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 19.
- Baital, Bachtiar, 2015, “Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol. 2 No. 2, hal. 243.
- BBCNews, *Kejaksaan Agung Kembalikan Berkas Kasus Pelanggaran HAM Berat, Bagaimana Komitmen Presiden Jokowi?*, dalam <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-46822119.amp>, diakses pada tanggal 5 Maret 2021 pukul 06:55 WIB.
- Hamzah, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 10.
- Harapan, Bazar & Nawangsih Sutardi, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Jakarta: CV Yani’s, hal. 33-34.
- Husein, Harun M., 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 21.
- Husein, Harun M., 2005, *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya)*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 39.
- Ilham, Maya Hildawati, “Kajian atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 7 No. 3, hal. 213.
- Ipda Heru, Kaur Binops Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, pada hari Rabu, 5 Mei 2021, di Kantor Satreskrim Polresta Surakarta.
- Melissa, Julita, 2013, “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 1 No. 1, hal. 163.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hal. 135.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 4.

- Nawawi, Barda, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 5.
- Nugroho, Bastianto, 2017, “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 32 No. 1, hal. 19.
- Nusantara, Hakim, 1986, *Penjelasan KUHAP dan Peraturan Pelaksanaan*, Jakarta: Djambatan, hal. 21.
- Poernomo, Bambang, *Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana dalam Membangun Model Penegakan Hukum di Indonesia*, (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta), 5 Juli 1989, hal. 8.
- Prinst, Darwan, 1998, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, hal. 133.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1984, *Komentaris atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Djambatan, hal. 11.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1984, *Komentaris atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Djambatan, hal. 133.
- Putu Tresna, Artha, “Konsepsi Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/49741/29551>, diakses pada tanggal 12 Maret 2021.
- Rahayu N.R., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, pada hari Kamis, 6 Mei 2021, di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Surakarta.
- Sabuan, Ansori, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, hal. 74.
- Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediataman, hal. 1.
- Sasangka, Hari & Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, hal. 11.
- Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum*, Bandung: PT Alumni, hal. 4.
- Sinamo, Jansen H., 2008, *8 Etos Kerja Profesional*, Jakarta: PT. Malta Print Indo, hal. 35.
- Sitanggang, Febriani Falentina, 2013, “Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Korupsi”, Yogyakarta: Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, hal. 9.
- Sofyan, Andi & Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, hal. 99.

- SuaraMerdekaSolo, 3 *Pimpinan Bank UOB Ditahan, Kasus Dugaan Tindak Pidana Kejahatan Perbankan*, dalam <https://suaramerdekasolo.com/2020/04/14/3-pimpinan-bank-uob-ditahan-kasus-dugaan-tindak-pidana-kejahatan-perbankan/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 02:31 WIB.
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hal. 1.
- Suharyo, 2016, “Peranan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pemberantasan Korupsi di Negara Demokrasi”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632, Vol. 16 No. 1, hal. 20.
- Sumitro, 2018, “Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 6 No. 1, hal. 23.
- Sundari, E., 2015, *Praktik Class Action di Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hal. 3.
- Tjitrisubono, Harjono, 1982, *Hukum Acara Pidana (HAP) dalam Diskusi*. Surabaya: Bina Ilmu, hal. 32-33.
- Triwahyuningsih, Susani, 2018, “Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia”, *Jurnal Hukum Legal Standing: Universitas Merdeka Ponorogo*, Vol. 2 No. 2, hal. 113-114.
- Wulandari & Muchamad Iksan, 2017, “Kajian Yuridis-Empiris Mengenai Praktik Pra-penuntutan (Studi Kasus di Surakarta)”, *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, hal. 19.